



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Menimbang:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

32. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
33. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);
Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
DAN
WALI KOTA BANJARMASIN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
5. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 2.754.547.614.353,72	
b. Belanja	<u>Rp 2.287.073.116.992,00</u>	
Surplus/(Defisit)		Rp 467.474.497.361,72
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 105.550.494.734,92	
- Pengeluaran	<u>Rp 35.000.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		<u>Rp 70.550.494.734,92</u>
SILPA		Rp538.024.992.096,64

Pasal 5

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sebesar Rp158.840.578.370,72 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| a. Anggaran setelah Perubahan | Rp 2.595.707.035.983,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 2.754.547.614.353,72</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 158.840.578.370,72 |
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sebesar Rp379.184.413.726,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| a. Anggaran setelah Perubahan | Rp 2.666.257.530.718,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 2.287.073.116.992,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 379.184.413.726,00 |

- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sebesar Rp 105.550.494.734,37 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan | (Rp 70.550.494.735,00) |
| b. Realisasi | <u>Rp 467.474.497.361,72</u> |
| Selisih lebih/kurang | Rp 538.024.992.096,72 |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp0,08 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp 105.550.494.735,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 105.550.494.734,92</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 0,08 |
- (5) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp 35.000.000.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 35.000.000.000,00</u> |
| Selisih lebih/kurang | Rp 0,00 |
- (6) Selisih Anggaran dengan realisasi Pembiayaan netto sebesar Rp0,08 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan | Rp 70.550.494.735,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 70.550.494.734,92</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 0,08 |

Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp 105.550.494.734,92 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | (Rp 105.550.494.734,92) |
| c. SiLPA | <u>Rp 538.024.992.096,64</u> |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp 538.024.992.096,64 |

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp 8.081.178.911.217,43
b. Jumlah Kewajiban	<u>Rp 32.873.701.149,82</u>
c. Jumlah Ekuitas	Rp 8.048.305.210.067,61

Pasal 8

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp 2.755.866.205.118,88
b. Beban	Rp 2.196.747.186.865,73
c. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp 8.911.068.493,24
d. Pos Luar Biasa	<u>Rp 0,00</u>
Surplus/(Defisit) LO	Rp 568.030.086.746,39

Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp 878.546.128.826,21
b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Asset non Keuangan	(Rp 446.071.631.464,49)
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	Rp 0,00
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran	Rp 130.900.000,00
e. Kenaikan/Penurunan Kas	Rp 432.605.397.361,72
f. Saldo Kas Awal Per 01 Januari Tahun 2025	<u>Rp 105.550.494.734,92</u>
Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2025	Rp 538.155.892.096,64

Pasal 10

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp 7.365.257.642.526,94
b. Kenaikan/Penurunan Ekuitas	Rp 0,00
c. Surplus/(Defisit) LO	Rp 568.030.086.746,39
d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Koreksi Kesalahan	<u>Rp 115.017.480.794,28</u>
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp8.048.305.210.067,61

Pasal 11

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | |
|------------------|--|
| a. Lampiran I | : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas |
| Lampiran I.1 | : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| Lampiran I.2 | : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran I.3 | : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| Lampiran I.4 | : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| b. Lampiran II | : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; |
| c. lampiran III | : Laporan Operasional; |
| d. Lampiran IV | : Laporan Perubahan Ekuitas; |
| e. Lampiran V | : Neraca; |
| f. Lampiran VI | : Laporan Arus Kas; |
| g. Lampiran VII | : Catatan atas Laporan keuangan; |
| h. Lampiran VIII | : Daftar rekapitulasi piutang daerah; |
| i. Lampiran IX | : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; |
| j. Lampiran X | : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; |
| k. Lampiran XI | : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |

- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah.
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

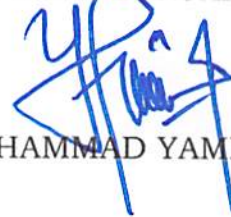
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Agustus 2026

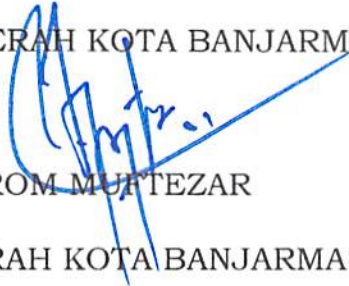
WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



ICHROM MUFTEZAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (9-57/2026)



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

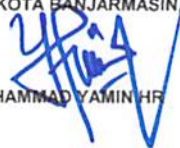
NO.	URAIAN	REF.	TA. 2025		(%)	TA. 2024
			ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	491.050.000.000,00	497.298.814.595,56	101,27	344.754.924.395,37
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	42.737.208.576,00	36.160.623.411,00	84,61	39.885.284.209,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	36.248.089.748,00	36.248.089.748,00	100,00	28.527.119.377,00
6	Lain-Lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	148.719.674.811,00	152.161.458.287,85	102,31	110.786.621.174,41
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		718.754.973.135,00	721.868.986.042,41	100,43	523.953.949.155,78
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	348.875.335.000,00	405.704.526.400,00	116,28	514.182.292.000,00
11	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	884.065.455.000,00	883.918.944.000,00	99,98	818.615.777.440,00
	Dana Alokasi Khusus-Fisik	5.1.1.2.1.4	8.946.999.000,00	7.823.805.153,00	87,44	20.703.148.135,00
12	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	5.1.1.2.1.4	235.002.059.000,00	218.785.910.602,00	93,09	212.846.019.001,00
13	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.476.889.848.000,00	1.516.233.186.155,00	102,66	1.566.347.236.576,00
14	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.1.1.2.2				
15	Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00		0,00
16	Insentif Fiskal		14.040.453.000,00	14.040.453.000,00	100,00	23.248.394.000,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		14.040.453.000,00	14.040.453.000,00	100,00	23.248.394.000,00
18	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.3				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		340.540.093.533,00	456.935.560.621,00	134,17	382.683.583.092,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		340.540.093.533,00	456.935.560.621,00	134,17	382.683.583.092,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer		1.831.470.394.533,00	1.987.209.199.776,00	108,50	1.972.279.213.668,00
22	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.1.1.3				
23	Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	270.000.000,00
23	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		25.000.000,00	12.760.220,31	51,04	207.523.493,96
24	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK		45.456.668.315,00	45.456.668.315,00	100,00	0,00
25	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		45.481.668.315,00	45.469.428.535,31	99,97	477.523.493,96
26	JUMLAH PENDAPATAN		2.595.707.035.983,00	2.754.547.614.353,72	106,12	2.496.710.686.317,74
27	BELANJA DAERAH	5.1.2				
28	Belanja Operasi	5.1.2.1				
29	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	970.304.883.889,00	889.636.278.931,00	91,68	825.560.117.703,00
30	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.051.851.443.464,00	919.789.776.786,51	87,44	846.647.942.037,65
31	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	69.443.638.425,00	63.927.947.064,00	92,05	98.571.477.440,42
32	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	1.305.000.000,00	1.051.000.000,00	80,53	3.326.000.000,00
33	Jumlah Belanja Operasi		2.092.904.965.778,00	1.874.405.002.781,51	89,56	1.774.105.537.181,07
34	Belanja Modal	5.1.2.2				
35	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	95.301.728.737,00	26.350.964.999,00	27,65	62.135.188.340,00
36	Belanja Peralatan & Mesin	5.1.2.2.2	147.422.942.758,00	134.814.394.164,79	91,44	138.520.912.436,00
37	Belanja Gedung & Bangunan	5.1.2.2.3	145.846.401.525,00	114.252.407.037,74	78,33	202.547.060.302,11
38	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	5.1.2.2.4	161.924.237.700,00	134.704.127.376,96	83,18	209.657.916.849,19
39	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	3.731.456.500,00	878.409.900,00	23,54	1.827.008.405,00
40	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	71.680.000,00	71.327.986,00	99,50	49.370.000,00

NO.	URAIAN	REF.	TA. 2025		(%)	TA. 2024
			ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
41	Jumlah Belanja Modal		554.298.447.220,00	411.071.631.464,49	74,16	614.737.456.332,30
42	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3				
43	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	13.915.988.928,00	1.596.482.746,00	11,47	1.080.000.000,00
44	Jumlah Belanja Tak Terduga		13.915.988.928,00	1.596.482.746,00	11,47	1.080.000.000,00
45	JUMLAH BELANJA		2.661.119.401.926,00	2.287.073.116.992,00	85,94	2.389.922.993.513,37
46	Belanja Transfer	5.1.2.5				
47	Belanja Bantuan Keuangan					
48	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	5.1.2.5.1	5.138.128.792,00	0,00	0,00	9.356.642.700,00
49	Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.2.5.2	0,00	0,00		0,00
50	Jumlah Belanja Transfer		5.138.128.792,00	0,00	0,00	9.356.642.700,00
51	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan		5.138.128.792,00	0,00	0,00	9.356.642.700,00
52	Jumlah Belanja		2.666.257.530.718,00	2.287.073.116.992,00	85,78	2.399.279.636.213,37
53	Surplus / (Defisit) LRA		-70.550.494.735,00	467.474.497.361,72	(662,61)	97.431.050.104,37
54	PEMBIAYAAN	5.1.3				
55	Penerimaan Pembiayaan	5.1.3.1				
56	Penggunaan SILPA	5.1.3.1.1	105.550.494.735,00	105.550.494.734,92	99,99	18.119.444.630,55
57	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	5.1.3.1.2	0,00	0,00		0,00
58	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		105.550.494.735,00	105.550.494.734,92	100,00	18.119.444.630,55
59	Pengeluaran Pembiayaan	5.1.3.2				
60	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.1	0,00	0,00		0,00
61	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.2.2	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	100,00	10.000.000.000,00
62	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	100,00	10.000.000.000,00
63	Pembiayaan Netto	5.1.3.3	70.550.494.735,00	70.550.494.734,92	100,00	8.119.444.630,55
64	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.1.4	0,00	538.024.992.096,64		105.550.494.734,92

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan utama ini.

Banjarmasin, 3 Agustus 2026

WALI KOTA BANJARMASIN



MUHAMMAD YAMIN HR



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2025 dan 2024

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
Nomor : 9 Tahun 2026
Tanggal : 3 Agustus 2026

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REF.	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
A	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	105.550.494.734,92	18.119.444.630,55
B	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	105.550.494.734,92	18.119.444.630,55
	Subtotal		0,00	0,00
C	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.2.3	538.024.992.096,64	105.550.494.734,92
	Subtotal		538.024.992.096,64	105.550.494.734,92
D	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	0,00
	1. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
	2. Lain-lain		0,00	0,00
E	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.2.5	538.024.992.096,64	105.550.494.734,92

Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan utama ini.

Banjarmasin, 3 Agustus 2026
WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REF.	2025	2024	NAIK/TURUN	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
1	PENDAPATAN	5.4.1.				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1.				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	503.659.229.713,87	352.164.417.633,72	151.494.812.080,15	43,02
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2.	36.626.513.367,00	39.483.763.827,00	(2.857.250.460,00)	(7,24)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	32.447.682.441,00	28.527.119.377,00	3.920.563.064,00	13,74
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	5.4.1.1.4	133.690.381.318,40	120.953.812.882,67	12.736.568.435,73	10,53
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		706.423.806.840,27	541.129.113.720,39	165.294.693.119,88	30,55
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	5.4.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil	5.4.1.2.1.1	363.196.384.400,00	368.687.178.000,00	(5.490.793.600,00)	(1,49)
12	Dana Alokasi Umum	5.4.1.2.1.2	883.918.944.000,00	818.615.777.440,00	65.303.166.560,00	7,98
13	Dana Alokasi Khusus Fisik	5.4.1.2.1.3	7.823.805.153,00	20.703.148.135,00	(12.879.342.982,00)	(62,21)
14	Dana Alokasi Khusus Non-Fisik	5.4.1.2.1.4	218.785.910.602,00	212.846.019.001,00	5.939.891.601,00	2,79
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.473.725.044.155,00	1.420.852.122.576,00	52.872.921.579,00	3,72
16						
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA					
18	Dana Insentif Daerah	5.4.1.2.2.1	0,00	0,00	-	
19	Insentif Fiskal	5.4.1.2.2.2	14.040.453.000,00	23.248.394.000,00	(9.207.941.000,00)	(39,61)
20	Jumlah Pendapatan Dana Transfer Lainnya		14.040.453.000,00	23.248.394.000,00	(9.207.941.000,00)	(39,61)
21						
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.4.1.2.3				
23	Pendapatan Bagi Hasil	5.4.1.2.3.1	472.598.795.440,00	460.522.358.533,45	12.076.436.906,55	2,62
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.4.1.2.3.2	0,00	0,00	-	
25	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		472.598.795.440,00	460.522.358.533,45	12.076.436.906,55	2,62
26	Jumlah Pendapatan Transfer-LO		1.960.364.292.595,00	1.904.622.875.109,45	55.741.417.485,55	2,93
27						
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.1.3				
29	Hibah	5.4.1.3.1	51.141.583.188,30	66.974.455.365,88	(15.832.872.177,58)	(23,64)
30	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya	5.4.1.3.2	12.760.220,31	210.723.493,96	(197.963.273,65)	
31	Pendapatan Lainnya	5.4.1.3.3	37.923.762.275,00	0,00	-	
32	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		89.078.105.683,61	67.185.178.859,84	21.892.926.823,77	32,59
33	JUMLAH PENDAPATAN		2.755.866.205.118,88	2.512.937.167.689,68	242.929.037.429,20	9,67
34						
35	BEBAN	5.4.2				
36	Beban Pegawai	5.4.2.1	882.898.440.150,00	831.145.713.385,94	51.752.726.764,06	6,23
37	Beban Persediaan	5.4.2.2	208.940.780.334,76	142.965.513.451,92	65.975.266.882,84	46,15
38	Beban Jasa	5.4.2.3	561.948.131.111,60	496.106.463.258,58	65.841.667.853,02	13,27
39	Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	37.651.021.448,01	26.951.432.149,08	10.699.589.298,93	39,70
40	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	105.636.288.348,00	126.978.941.308,00	(21.342.652.960,00)	(16,81)
41	Beban Hibah	5.4.2.6	63.388.697.601,00	96.224.254.768,42	(32.835.557.167,42)	(34,12)
42	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.7	1.051.000.000,00	3.326.000.000,00	(2.275.000.000,00)	(68,40)
43	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.8	4.374.571.377,85	12.065.239.051,51	(7.690.667.673,66)	(63,74)
44	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.9	329.261.773.748,51	330.391.422.910,02	(1.129.649.161,51)	(0,34)
45	Beban Transfer		0,00	9.356.642.700,00	(9.356.642.700,00)	(100,00)
46	Beban Tidak Terduga		1.596.482.746,00	1.080.000.000,00	516.482.746,00	47,82
47	JUMLAH BEBAN		2.196.747.186.865,73	2.076.591.622.983,47	120.155.563.882,26	5,79
48						
49	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		559.119.018.253,15	436.345.544.706,21	122.773.473.546,94	28,14
50						
51	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL	5.4.3.				
52	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	318.044.367,00	(318.044.367,00)	(100,00)
53	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		15.805.918.528,78	545.156.751.577,85	(529.350.833.049,07)	(97,10)
54	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		183.332,67	42.331.508,00	(42.148.175,33)	(99,57)
55	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		6.894.666.702,87	5.492.824.682,00	1.401.842.020,87	25,52
56	Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		8.911.068.493,24	539.939.639.754,85	(531.028.571.261,61)	(98,35)
57	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		568.030.086.746,39	976.285.184.461,06	(408.255.097.714,67)	(41,82)
58						
59	POS LUAR BIASA	5.4.4.				
60	Pendapatan Luar Biasa	5.4.4.1	0,00	0,00	-	
61	Beban Luar Biasa	5.4.4.2.	0,00	0,00	-	
62	Jumlah Pos Luar Biasa		0,00	0,00	-	
63	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.5.	568.030.086.746,39	976.285.184.461,06	(408.255.097.714,67)	(41,82)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan utama ini.

Banjarmasin, 3 Agustus 2026
WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	2025	2024
EKUITAS AWAL	5.6.1	7.365.257.642.526,94	6.257.666.720.083,42
SURPLUS/DEFISIT - LO	5.6.2	568.030.086.746,39	976.285.184.461,06
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KOREKSI KESALAHAN :	5.6.3	115.017.480.794,28	131.305.737.982,46
Koreksi Nilai Piutang		1.844.871.289,53	6.913.648.397,00
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang		94.981.441,06	8.590.599.935,82
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Koreksi Nilai Investasi		36.947.901.813,32	-
Koreksi Nilai Aset Tetap		46.879.849,67	143.005.790.752,98
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap		10.909.510.084,52	5.921.185.136,00
Koreksi Nilai Aset Lainnya		46.539.688.872,67	(10.044.654.258,00)
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-Lain		100.224.999,67	(2.479.325.051,00)
Koreksi Nilai Kewajiban Jangka Pendek		18.533.422.443,84	(20.601.506.930,34)
EKUITAS AKHIR	5.6.4	8.048.305.210.067,61	7.365.257.642.526,94

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan utama ini.

Banjarmasin, 3 Agustus 2026
WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NERACA

Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REF.	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	538.024.992.096,64	105.550.494.734,92
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	517.662.797.025,41	82.657.454.559,57
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.2	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.3	0,00	0,00
7	Kas Dana BLUD	5.3.1.1.1.4	18.648.425.985,06	19.114.013.485,18
8	Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.5	0,00	0,00
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.6	0,00	0,00
10	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7	0,00	0,00
11	Kas Dana BOSP		588.530.271,17	149.104.735,17
12	Kas Dana BOK Puskesmas		1.125.238.815,00	3.629.921.955,00
13	Setara Kas	5.3.1.1.1.8	0,00	0,00
14	Piutang Pajak	5.3.1.1.2	135.190.409.135,00	128.694.473.362,00
15	Piutang Retribusi	5.3.1.1.3	10.566.706.141,09	15.982.145.584,88
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.3.1.1.4	39.794.442.613,00	0,00
17	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.5	11.211.261.641,05	31.008.361.850,56
18	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.3.1.1.6	0,00	0,00
19	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.7	165.563.992.063,00	149.900.757.244,00
20	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.1.8	119.962.350,00	119.962.350,00
21	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.9	-117.745.691.632,70	(118.728.807.114,70)
22	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.10	618.728.789,31	77.633.333,33
23	Persediaan	5.3.1.1.11	38.452.976.515,85	34.886.999.005,18
24	Jumlah Aset Lancar		821.797.779.712,24	347.492.020.350,17
25	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
26	Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1		
27	Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	0,00	0,00
28	Penyisihan Piutang Dana Bergulir		0,00	0,00
29	Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.1.2	86.259.834,44	86.259.834,44
30	Jumlah Investasi Non Permanen		86.259.834,44	86.259.834,44
31	Investasi Permanen	5.3.1.2.2		
32	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	1.653.377.769.326,11	1.615.843.905.081,01
33	Jumlah Investasi Permanen		1.653.377.769.326,11	1.615.843.905.081,01
34	Jumlah Investasi Jangka Panjang		1.653.464.029.160,55	1.615.930.164.915,45
35	ASET TETAP	5.3.1.3		
36	Tanah	5.3.1.3.1	2.297.983.177.712,00	2.230.343.285.231,00
37	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	1.227.117.010.055,34	1.111.467.628.689,68
38	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.859.680.184.473,51	1.662.572.878.980,19
39	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	2.912.521.513.238,48	2.789.787.847.930,17
40	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	82.306.108.303,06	81.131.785.403,06
41	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	63.664.800.373,99	129.174.503.444,56
42	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.1.3.7	-3.090.551.373.298,26	(2.776.360.061.035,71)
43	Jumlah Aset Tetap		5.352.721.420.858,12	5.228.117.868.642,95
44	DANA CADANGAN	5.3.1.4		
45	Dana Cadangan		0,00	0,00
46	Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00
47	ASET LAINNYA	5.3.1.5		
48	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1		
49	Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.5.1.1	0,00	0,00
50	Tuntutan ganti Rugi	5.3.1.5.1.2	0,00	1.053.885.752,55
51	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	161.915.391.616,62	0,00
52	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	12.403.269.486,00	11.441.503.500,00
53	Aset Lain-Lain	5.3.1.5.4	82.740.250.909,27	47.702.251.270,28
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.5	-4.686.435.616,44	(4.401.690.150,00)

NO.	URAIAN	REF.	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		-30.269.663.568,93	-
	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		2.910.123.428,00	-
	Dana Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.6	-	42.508.142.000,00
	Jumlah Aset Lainnya		225.012.936.254,52	98.304.092.372,83
54	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.6		
55	Properti Investasi Tanah	5.3.1.6.1	28.182.745.232,00	144.437.681.912,00
56	Jumlah Properti Investasi		28.182.745.232,00	144.437.681.912,00
57	JUMLAH ASET		8.081.178.911.217,43	7.434.281.828.193,40
58	KEWAJIBAN	5.3.2.		
59	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
60	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	514.103.251,83	77.066.455,82
61	Utang Belanja	5.3.2.1.3	29.093.504.784,00	46.744.246.778,00
62	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	3.266.093.113,99	22.202.872.432,64
63	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		32.873.701.149,82	69.024.185.666,46
64	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
65	Utang Dalam Negeri	5.3.2.2.1	0,00	0,00
66	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
67	JUMLAH KEWAJIBAN		32.873.701.149,82	69.024.185.666,46
68	EKUITAS			
69	EKUITAS	5.3.3	8.048.305.210.067,61	7.365.257.642.526,94
70	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8.081.178.911.217,43	7.434.281.828.193,40

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan utama ini.

Banjarmasin, 3 Agustus 2026
WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR

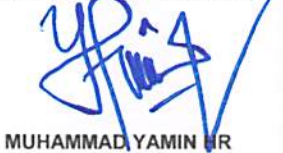
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)				
NO.	URAIAN	REF.	2025	2024
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Pendapatan Pajak Daerah		497.298.814.595,56	344.754.924.395,37
4	Pendapatan Retribusi Daerah		36.160.623.411,00	39.885.284.209,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		36.248.089.748,00	28.527.119.377,00
6	Lain-lain PAD yang Sah		152.161.458.287,85	110.403.262.174,41
7	Dana Bagi Hasil Pajak		88.105.658.400,00	70.600.676.000,00
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		315.884.578.000,00	438.621.570.000,00
9	Dana Bagi Hasil Lainnya		1.714.290.000,00	4.960.046.000,00
10	Dana Alokasi Umum		883.918.944.000,00	818.615.777.440,00
11	Dana Alokasi Khusus		226.609.715.755,00	233.549.167.136,00
12	Dana Transfer Pusat lainnya		14.040.453.000,00	23.248.394.000,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		456.935.560.621,00	382.683.583.092,00
14	Belanja Transfer		0,00	0,00
15	Penerimaan Hibah		12.760.220,31	477.523.493,96
16	Penerimaan Lainnya		45.456.668.315,00	0,00
17	Jumlah Arus Masuk Kas		2.754.547.614.353,72	2.496.327.327.317,74
18	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
19	Belanja Pegawai		889.636.278.931,00	825.560.117.703,00
20	Belanja Barang dan Jasa		919.789.776.786,51	846.647.942.037,65
21	Hibah		63.927.947.064,00	98.571.477.440,42
22	Bantuan Sosial		1.051.000.000,00	3.326.000.000,00
23	Belanja Transfer Bantuan Keuangan		0,00	9.356.642.700,00
24	Belanja Tak Terduga		1.596.482.746,00	1.080.000.000,00
25	Jumlah Arus Keluar Kas		1.876.001.485.527,51	1.784.542.179.881,07
26	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		878.546.128.826,21	711.785.147.436,67
27	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
28	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
29	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
30	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	358.700.000,00
31	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
32	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
33	Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		0,00	24.659.000,00
34	Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya		0,00	0,00
35	Pendapatan Pengembalian Pokok Investasi Non Permanen		0,00	0,00
36	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	383.359.000,00
37	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
38	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
39	Belanja Tanah		26.350.964.999,00	62.135.188.340,00
40	Belanja Peralatan dan Mesin		134.814.394.164,79	138.520.912.436,00
41	Belanja Gedung dan Bangunan		114.252.407.037,74	202.547.060.302,11
42	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		134.704.127.376,96	209.657.916.849,19
43	Belanja Aset Tetap Lainnya		878.409.900,00	1.827.008.405,00
44	Belanja Aset Lainnya		71.327.986,00	49.370.000,00
45	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		35.000.000.000,00	10.000.000.000,00
46	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
47	Jumlah Arus Keluar Kas		446.071.631.464,49	624.737.456.332,30
48	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(446.071.631.464,49)	(624.354.097.332,30)
49	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
50	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
51	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
52	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
53	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
54	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
55	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
56	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
57	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
58	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
59	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
60	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
61	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00

NO.	URAIAN	REF.	2025	2024
62	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
63	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
64	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
65	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
66	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
67	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
68	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		0,00	0,00
69	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
70	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
71	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		89.903.397.433,61	58.342.779.045,00
72	Penerimaan Jaminan		155.260.000,00	0,00
73	Penerimaan UYHD Tahun lalu dari Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
74	Penerimaan UP/TU		53.289.335.568,00	96.667.676.873,00
75	Penerimaan Sisa UP/TU Nihil		37.786.068.522,00	13.099.937.528,00
76	Jumlah Arus Masuk Kas		181.134.061.523,61	168.110.393.446,00
77	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
78	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		89.903.397.433,61	58.342.779.045,00
79	Pengeluaran Jaminan		24.360.000,00	0,00
80	Pengeluaran SP2D UP/TU		91.075.404.090,00	109.767.614.401,00
81	Jumlah Arus Keluar Kas		181.003.161.523,61	168.110.393.446,00
82	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		130.900.000,00	0,00
83	Kenaikan/Penurunan Kas		432.605.397.361,72	87.431.050.104,37
84	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		105.550.494.734,92	18.119.444.630,55
85	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.5	538.155.892.096,64	105.550.494.734,92
86	Saldo Akhir Kas di Bendahara Umum Daerah		517.662.797.025,41	82.657.454.559,57
87	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
88	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
89	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD		18.648.425.985,06	19.114.013.485,18
90	Saldo Akhir Kas Dana BOS		0,00	0,00
91	Saldo Akhir Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)		0,00	0,00
92	Saldo Akhir Kas Lainnya		0,00	0,00
93	Saldo Akhir Kas Dana BOSP		588.530.271,17	149.104.735,17
94	Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas		1.125.238.815,00	3.629.921.955,00
95	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya		130.900.000,00	0,00
96	Saldo Akhir Kas		538.155.892.096,64	105.550.494.734,92

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan utama ini.

Banjarmasin, 3 Agustus 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH
Nomor : 9 Tahun 2026
Tanggal : 3 Agustus 2026

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TERLAMPIR DALAM BENTUK BUKU

Banjarmasin, 3 Agustus 2026

WALI KOTA,



MUHAMMAD YAMIN HR

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4 + 5 - 6)
A.	PIUTANG PENDAPATAN		325.585.738.041,44	360.553.731.339,02	323.812.657.787,32	362.326.811.593,14
I	PIUTANG PAJAK		128.694.473.362,00	135.190.409.135,00	128.694.473.362,00	135.190.409.135,00
	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	2010-2012	202.295.000,00	-	202.295.000,00	-
	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2025	7.440.185.952,00	7.449.982.726,00	7.440.185.952,00	7.449.982.726,00
	Piutang Pajak Parkir	2010	68.767.840,00	-	68.767.840,00	-
	Piutang PBBP2	1993-2025	120.983.224.570,00	127.719.893.809,00	120.983.224.570,00	127.719.893.809,00
	Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru	2025	-	20.532.600,00	-	20.532.600,00
II	PIUTANG RETRIBUSI		15.982.145.584,88	1.086.452.599,00	6.501.892.042,79	10.566.706.141,09
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	2025	537.283.184,00	659.751.094,00	572.414.618,00	624.619.660,00
	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2025	26.077.500,00	26.226.000,00	26.077.500,00	26.226.000,00
	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2025	-	400.475.500,00	-	400.475.500,00
	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	2000-2024	15.344.828.400,88	5,00	5.903.399.924,79	9.441.428.481,09
	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2010	1.270.000,00	-	-	1.270.000,00
	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2011	72.686.500,00	-	-	72.686.500,00
III	PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		-	39.794.442.613,00	-	39.794.442.613,00
	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada E	2025	-	16.911.107.983,00	-	16.911.107.983,00
	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada E	2025	-	22.883.334.630,00	-	22.883.334.630,00
IV	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH		31.008.361.850,56	18.918.434.929,02	38.715.535.138,53	11.211.261.641,05
	Piutang Hasil Sewa BMD	2023-2025	704.865.000,00	3.100.220.572,60	52.630.000,00	3.752.455.572,60
	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	2003 & 2025	5.000.000,00	310.950.684,93	13.704.109,59	302.246.575,34
	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2024	5.623.373,00	-	5.623.373,00	-
	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2023	5.575.000,00	-	-	5.575.000,00
	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2025	-	293.874.225,58	1.228.121,82	292.646.103,76
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2024	48.008.839,06	48.008.839,06	96.017.678,12	-
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	2025	-	2.129.207.540,00	-	2.129.207.540,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	2025	-	11.262.500,00	-	11.262.500,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	2024	97.939.740,92	97.939.740,92	195.879.481,84	-
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberi	2025	-	6.600.665,92	-	6.600.665,92
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga,	2024-2025	215.366.200,00	754.615.663,00	430.732.400,00	539.249.463,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Ba	2024-2025	868.284.871,90	1.041.534.228,68	1.736.569.743,80	173.249.356,78
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigas	2024-2025	1.103.999.568,33	1.180.268.308,98	2.207.999.136,66	76.268.740,65
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigas	2024-2025	18.562.627,35	27.189.562,35	37.125.254,70	8.626.935,00
	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2023-2025	20.395.914.065,00	9.849.790.972,00	26.398.731.849,00	3.846.973.188,00
	Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	2023-2024	6.316.525,00	71.425,00	6.387.950,00	-
	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	2025	-	66.900.000,00	-	66.900.000,00
	Piutang Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	2024	7.532.906.040,00	-	7.532.906.040,00	-
V	PIUTANG PENDAPATAN TRANSFER		149.900.757.244,00	165.563.992.063,00	149.900.757.244,00	165.563.992.063,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak	2025	149.900.757.244,00	165.563.992.063,00	149.900.757.244,00	165.563.992.063,00
B.	PIUTANG LAINNYA		119.962.350,00	-	-	119.962.350,00
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2010-2014	119.962.350,00	-	-	119.962.350,00
	JUMLAH PIUTANG PENDAPATAN PER 31 DES 2024		325.705.700.391,44	360.553.731.339,02	323.812.657.787,32	362.446.773.943,14

Banjarmasin, 3 Agustus 2026

WALI KOTA

MUHAMMAD YAMIN HR

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH

Nomor : 9 Tahun 2026

Tanggal : 3 Agustus 2026

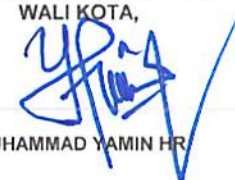
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
I	1. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.449.982.726,00	(37.249.913,63)	7.412.732.812,37
	2. BPHTB-Pemberian Hak Baru	20.532.600,00	(102.663,00)	20.429.937,00
	3. PBBP2	127.719.893.809,00	(105.091.228.813,01)	22.628.664.995,99
	Jumlah Piutang Pajak	135.190.409.135,00	(105.128.581.389,64)	30.061.827.745,36
II	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	624.619.660,00	(551.978.059,13)	72.641.600,87
	2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	26.226.000,00	(131.130,00)	26.094.870,00
	3. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.475.500,00	(189.437.750,00)	211.037.750,00
	4. Retribusi Kios	9.441.428.481,09	(9.441.428.481,09)	0,00
	5. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.270.000,00	(1.270.000,00)	0,00
	6. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	72.686.500,00	-72.686.500,00	0,00
	Jumlah Piutang Retribusi	10.566.706.141,09	(10.256.931.920,22)	309.774.220,87
III	1. Hasil Sewa BMD	3.752.455.572,60	(1.624.859.996,01)	2.127.595.576,59
	2. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	302.246.575,34	(8.314.657,53)	293.931.917,81
	3. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	5.575.000,00	(5.575.000,00)	0,00
	4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	292.646.103,76	(1.463.230,52)	291.182.873,24
	5. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja B	2.129.207.540,00	(10.646.037,70)	2.118.561.502,30
	6. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja J	11.262.500,00	(56.312,50)	11.206.187,50
	7. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja U	6.600.665,92	(33.003,33)	6.567.662,59
	8. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja H	539.249.463,00	(2.696.247,32)	536.553.215,69
	9. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja N	173.249.356,78	(866.246,79)	172.383.109,99
	10. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja	76.268.740,65	(381.343,70)	75.887.396,95
	11. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja	8.626.935,00	(43.134,68)	8.583.800,32
	12. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	3.846.973.188,00	(384.530.049,69)	3.462.443.138,31
	13. Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	66.900.000,00	(1.778.500,00)	65.121.500,00
	Jumlah Piutang Lain – Lain PAD yang Sah	11.211.261.641,05	(2.041.243.759,77)	9.170.017.881,28
IV	1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)	16.911.107.983,00	(84.555.539,92)	16.826.552.443,08
	2. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)	22.883.334.630,00	(114.416.673,15)	22.768.917.956,85
Jumlah Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan		39.794.442.613,00	(198.972.213,07)	39.595.470.399,93
V	1. Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai	119.962.350,00	(119.962.350,00)	0,00
	Jumlah Piutang Pendapatan Lainnya	119.962.350,00	(119.962.350,00)	0,00
JUMLAH PER 31 DESEMBER 2024		196.882.781.880,14	(117.745.691.632,71)	79.137.090.247,44

Banjarmasin, 3 Agustus 2026

WALI KOTA,


 MUHAMMAD YAMIN HR

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH
Nomor : 9 Tahun 2026
Tanggal : 3 Agustus 2026

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1				
2				
3				
dst				

Banjarmasin, 3 Agustus 2026

WALI KOTA,

MUHAMMAD YAMIN HR

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DAFTAR PERYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN/LEMBAGA PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH PENYERTAAN DAERAH	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AWAL TAHUN	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-8	11	12	13=9-12
1	2009	PT Bank Kalimantan Selatan	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2022	-	70.000.597.704,00	170.800.402.296,00	20.000.000.000,00	190.800.402.296,00	20.000.597.704,00	0,00	0,00	190.800.402.296,00
2	2005	Perusahaan PT Air Minum Bandarmasih (PT AM Bandarmasih)	-	-	0,00	262.409.105.000,00 153.911.558.556,00	0,00	416.320.663.556,00	0,00	0,00	0,00	416.320.663.556,00
3	2006	Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (PERUMDA PALD)	-	-	0,00 0,00	125.449.673.050,00 42.650.341.284,00	0,00 0,00	168.100.014.334,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	168.100.014.334,00
4	2024	Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman (PERUMDA Pasar Baiman)	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2024	-	850.759.100.000,00 15.000.000.000,00	0,00 0,00	15.000.000.000,00 0,00	865.759.100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	865.759.100.000,00
J U M L A H					935.759.697.704,00	755.221.080.186,00	35.000.000.000,00	1.640.980.180.186,00	20.000.597.704,00	0,00	0,00	1.640.980.180.186,00

Banjarmasin, 3 Agustus 2026
WALI KOTA,

MUHAMMAD YAMIN HR

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH

Nomor : 9 Tahun 2026

Tanggal : 3 Agustus 2026

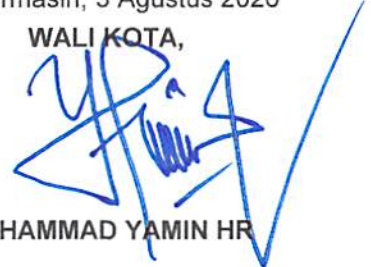
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

**DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025***(Dalam Rupiah)*

No	URAIAN	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Tanah	2.230.343.285.231,00	70.518.037.999,00	2.878.145.518,00	2.297.983.177.712,00
2	Peralatan dan Mesin	1.111.467.628.689,68	136.521.427.272,79	20.872.045.907,13	1.227.117.010.055,34
3	Gedung & Bangunan	1.662.572.878.980,19	206.437.392.479,10	9.330.086.985,78	1.859.680.184.473,51
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.789.787.847.930,17	137.044.647.425,96	14.310.982.117,65	2.912.521.513.238,48
5	Aset Tetap lainnya	81.131.785.403,06	1.174.322.900,00	-	82.306.108.303,06
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	129.174.503.444,56	22.342.650.587,00	87.852.353.657,57	63.664.800.373,99

Banjarmasin, 3 Agustus 2026

WALI KOTA,


MUHAMMAD YAMIN HR

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH
Nomor : 9 Tahun 2026
Tanggal : 3 Agustus 2026

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah	2.230.343.285.231,00	70.518.037.999,00	2.878.145.518,00	2.297.983.177.712,00
2	Peralatan dan Mesin	1.111.467.628.689,68	136.521.427.272,79	20.872.045.907,13	1.227.117.010.055,34
3	Gedung & Bangunan	1.662.572.878.980,19	206.437.392.479,10	9.330.086.985,78	1.859.680.184.473,51
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.789.787.847.930,17	137.044.647.425,96	14.310.982.117,65	2.912.521.513.238,48
5	Aset Tetap lainnya	81.131.785.403,06	1.174.322.900,00	-	82.306.108.303,06
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	129.174.503.444,56	22.342.650.587,00	87.852.353.657,57	63.664.800.373,99

Banjarmasin, 3 Agustus 2026

WALI KOTA,

MUHAMMAD YAMIN HR

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2025	REKLASIFIKASI								SALDO PER 31 DESEMBER 2025
			BERTAMBAH				BERKURANG				
			TANAH	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	TANAH	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	
1	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	3.526.425.764,00	-	4.029.093.193,00	-	-	-	2.784.212.496,00	-	-	4.771.306.461,00
2	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	68.341.708.144,43	-	39.736.555.652,43	-	-	-	107.061.894.844,86	-	-	1.016.368.952,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	51.208.248.462,41	-	1.220.615.000,00	14.295.357.983,00	-	-	14.773.282.435,14	1.602.370.800,00	-	50.348.568.210,27
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	850.895.693,00	-	86.380.400,00	198.404.286,00	-	-	-	359.581.598,00	-	776.098.781,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan	198.366.260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	198.366.260,00
6	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	287.873.063,00	-	412.715.947,00	99.406.000,00	-	-	-	-	-	799.995.010,00
7	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	36.640.545,00	-	114.623.613,00	-	-	-	17.780.313,00	-	-	133.483.845,00
8	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	893.791.600,00	-	394.197.130,00	-	-	-	-	-	-	1.287.988.730,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	33.596.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.596.000,00
10	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	640.864.000,00	-	388.524.000,00	-	-	-	344.438.000,00	-	-	684.950.000,00
11	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	247.257.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	247.257.000,00
12	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	511.942.782,72	116.655.561,00	266.721.234,00	-	-	-	-	-	-	895.319.577,72
13	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Banjarmasin	381.697.555,00	-	-	-	-	-	-	-	-	381.697.555,00
14	Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	1.110.488.570,00	-	197.415.640,00	97.081.710,00	-	-	324.039.000,00	-	-	1.080.946.920,00
15	Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	71.768.437,00	-	35.396.790,00	-	-	-	60.808.852,00	-	-	46.356.375,00
16	Badan Pengelolaan Keuangan, Per	98.371.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	98.371.530,00
17	Inspektorat Kota Banjarmasin	99.484.971,00	-	-	-	-	-	99.484.971,00	-	-	-
18	Kecamatan Banjarmasin Timur	99.317.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.317.000,00
19	Kecamatan Banjarmasin Utara	230.187.825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	230.187.825,00
20	Kecamatan Banjarmasin Tengah	35.938.692,00	-	35.607.100,00	-	-	-	-	-	-	71.545.792,00
21	Kecamatan Banjarmasin Barat	269.639.550,00	-	193.439.000,00	-	-	-	-	-	-	463.078.550,00
22											
J U M L A H		129.174.503.444,56	116.655.561,00	47.111.284.699,43	14.690.249.979,00	-	-	125.465.940.912,00	1.961.952.398,00	-	63.664.800.373,99

Banjarmasin, 3 Agustus 2026

WALI KOTA,


 MUHAMMAD YAMIN H

LAMPIRAN XV. : PERATURAN DAERAH

Nomor : 9 Tahun 2026

Tanggal : 3 Agustus 2026

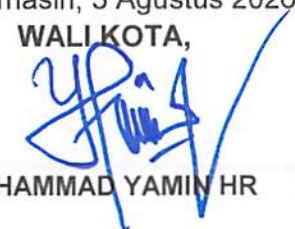
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Tagihan Jangka Panjang	1.053.885.752,55	1.053.885.752,55	2.107.771.505,10	0,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	167.018.306.380,00	5.102.914.763,38	161.915.391.616,62
3	Aset Tidak Berwujud	11.441.503.500,00	2.033.824.236,00	1.072.058.250,00	12.403.269.486,00
	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.401.690.150,00)	(1.370.703.716,11)	(1.085.958.249,67)	(4.686.435.616,44)
	<i>Aset Tak Berwujud Netto</i>	7.039.813.350,00	663.120.519,89	(13.899.999,67)	7.716.833.869,56
4	Aset Lain-lain	47.702.251.270,28	37.068.718.938,66	2.030.719.299,67	82.740.250.909,27
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	(30.274.717.968,93)	(5.054.400,00)	(30.269.663.568,93)
	<i>Aset Lain-lain Netto</i>	47.702.251.270,28	6.794.000.969,73	2.025.664.899,67	52.470.587.340,34
5	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	2.910.123.428,00	0,00	2.910.123.428,00
6	Dana <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	42.508.142.000,00	0,00	42.508.142.000,00	-
	JUMLAH	98.304.092.372,83	178.439.437.050,17	51.730.593.168,48	225.012.936.254,52

Banjarmasin, 3 Agustus 2026

WALI KOTA,


 MUHAMMAD YAMIN HR

KOTA BANJARMASIN
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer Dari Kas Daerah	Transfer Ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana Yang Belum Dicapang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
dst								
Jumlah			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banjarmasin, 3 Agustus 2026

WALI KOTA,

MUHAMMAD YAMIN HR

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH

Nomor : 9 Tahun 2026

Tanggal : 3 Agustus 2026

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	Pendapatan Diterima Dimuka	77.066.455,82	931.552.788,84	494.515.992,83	514.103.251,83
2	Utang Belanja	46.744.246.778,00	32.854.844.724,00	50.505.586.718,00	29.093.504.784,00
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	22.202.872.432,64	724.080.224,68	19.660.859.543,33	3.266.093.113,99
JUMLAH		69.024.185.666,46	34.510.477.737,52	70.660.962.254,16	32.873.701.149,82

Banjarmasin, 3 Agustus 2026

WALIKOTA,

MUHAMMAD YAMIN HR

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1					
2					
dst					
JUMLAH					

(dalam rupiah)

Banjarmasin, 3 Agustus 2026

WALIKOTA,



MUHAMMAD YAMIN HR

Nomor : 9 Tahun 2026
Tanggal : 3 Agustus 2026

[illegible]

MUHAMMAD YAMIN HR

KOTA BANJARARMASIN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

	</																			

KOTA BANJARMASIN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	BUMD/ Perusahaan Daerah Tahun 2025	Sumber a)	Status b)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Perbankan				2.466.542.000.000	2.020.101.000.000		446.441.000.000					438.557.000.000
2	Bidang Air Minum												
PT Air Minum Bandarmasih, 2025					387.507.510.942,00	326.640.758.109,00		60.866.752.833,00	7.123.937.281,00	471.062.262,00		67.519.627.852,00	
3	Bidang Pengelolaan Air Limbah												
Perumda PALD, 2025					3.310.603.405,00	7.437.072.552,00		(4.126.469.147,00)	308.608.771,00	85.527.416,00		(3.903.387.793,00)	
4	Bidang Pengelolaan Pasar dan Pelayanan Umum Pemasaran												
Perumda Pasar Barmen, 2025					8.610.582.305,00	11.075.257.800,00		(2.464.675.495,00)	830.828.285,00	(684.976.754,00)		(2.518.823.964,00)	
Jumlah					2.865.970.696.852	2.365.254.088.461		500.716.608.191	8.263.374.337	(328.387.076)		499.654.416.095	
No	BUMD/ Perusahaan Daerah Tahun 2024	Sumber a)	Status b)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Perbankan				2.202.092.000.000	1.777.015.000.000		425.077.000.000					381.155.000.000
2	Bidang Air Minum												
PT Air Minum Bandarmasih, 2024					380.570.677.568,00	325.357.462.117,00		55.213.215.471,00	6.771.053.411,00	764.364.907,00		61.219.903.975,00	
3	Bidang Pengelolaan Air Limbah												
Perumda PALD, 2024					3.000.040.964,00	8.774.823.742,00		(5.774.782.758,00)	291.032.553,00	9.074.477,00		(5.492.824.682,00)	
Jumlah					2.585.662.718.572	2.111.147.285.899		(5.774.782.758)	7.062.085.964	773.439.384		436.882.079.293	

Banjarmasin, 3 Agustus 2026
WALI KOTA,

MUHAMMAD YAMIN HR